

Tabel 2.3 Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

TUJUAN	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Meningkatkan Profesionalitas ASN	Manajemen ASN dan pengisian jabatan serta pembinaan karier ASN	Belum optimalnya implementasi manajemen ASN dan penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan dan pembinaan karier ASN, termasuk pengembangan karier berbasis kinerja dan kompetensi.	Tidak terdapat isu KLHS yang relevan dengan tugas dan fungsi BKD	Tuntutan profesionalisme ASN dan pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis global	Penguatan sistem merit, manajemen talenta, profesionalitas ASN dan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN	Penempatan ASN berdasarkan prinsip meritokrasi, perencanaan kebutuhan ASN, redistribusi ASN dan pembinaan karier ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Belum optimalnya pemenuhan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan pemutakhiran data mandiri ASN di lingkungan Pemprov. Sumsel.
	Pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalitas ASN	Masih terdapat kesenjangan kompetensi ASN dengan tuntutan jabatan dan kebutuhan organisasi serta belum optimalnya pengembangan kompetensi yang berbasis kebutuhan organisasi dan individu. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN.	Tidak terdapat isu KLHS yang relevan dengan tugas dan fungsi BKD	ASN dituntut adaptif terhadap transformasi digital, perkembangan teknologi, perubahan pola kerja dan kebutuhan kompetensi masa depan	Pengembangan kompetensi ASN sebagai bagian dari penguatan profesionalitas, sistem merit dan manajemen talenta ASN	Perluanya peningkatan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai kebutuhan jabatan dan arah pembangunan daerah	
	Pembinaan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN	Belum optimalnya konsistensi penerapan NSPK manajemen ASN pada perangkat daerah, sehingga diperlukan penguatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian penerapan NSPK dalam seluruh proses manajemen ASN.	Tidak terdapat isu KLHS yang relevan dengan tugas dan fungsi BKD	Tuntutan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional dan berbasis standar	Penguatan kepatuhan terhadap NSPK manajemen ASN, sistem merit, profesionalitas dan akuntabilitas ASN	Perluanya peningkatan pembinaan dan pengawasan penerapan NSPK pada seluruh perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan	Tantangan digitalisasi penuh (paperless) pelayanan administrasi serta standarisasi kepatuhan regulasi manajemen kepegawaian.
	Pengelolaan data dan sistem informasi kepegawaian	Belum optimalnya integrasi, akurasi, pemutakhiran dan pemanfaatan data kepegawaian sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen ASN serta kebutuhan peningkatan otomatisasi layanan kepegawaian yang cepat, mudah, terintegrasi dan paperless.	Tidak terdapat isu KLHS yang relevan dengan tugas dan fungsi BKD	Transformasi digital, artificial intelligence, big data dan pengelolaan SDM berbasis data	Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), transformasi digital pemerintahan dan integrasi data ASN	Peningkatan digitalisasi layanan kepegawaian dan integrasi sistem informasi kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	
	Perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Belum optimalnya keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta belum optimalnya penyesuaian indikator kinerja organisasi dengan indikator kinerja individu melalui cascading.	Tidak terdapat isu KLHS yang relevan dengan tugas dan fungsi BKD	Tuntutan global terhadap pemerintahan yang berbasis kinerja, akuntabel, transparan dan berorientasi hasil	Penguatan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja ASN dan peningkatan kualitas SAKIP	Penguatan tata kelola pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik berkualitas	Perluanya penguatan akuntabilitas kinerja instansi (SAKIP), efisiensi tata kelola internal, dan sinkronisasi penganggaran di lingkungan BKD.
	Tata kelola organisasi dan dukungan manajemen perangkat daerah	Belum optimalnya kualitas tata kelola internal perangkat daerah yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penganggaran dan keuangan, pengelolaan BKD serta tata kelola kepegawaian dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi.	Tidak terdapat isu KLHS yang relevan dengan tugas dan fungsi BKD	Good governance, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas organisasi menjadi tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern	Penguatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Peningkatan kualitas tata kelola organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	
	Koordinasi dan pembinaan manajemen ASN lintas perangkat daerah	Belum optimalnya sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah dalam pelaksanaan manajemen ASN, khususnya dalam penyediaan data, pengembangan kompetensi, pengembangan karier, penilaian kinerja dan penerapan NSPK.	Tidak terdapat isu KLHS yang relevan dengan tugas dan fungsi BKD	Collaborative governance dan integrasi pengelolaan sumber daya manusia semakin diperlukan dalam menghadapi kompleksitas pemerintahan	Penguatan koordinasi dan integrasi manajemen ASN serta penerapan sistem merit secara nasional	Karakteristik organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas berbagai perangkat daerah membutuhkan koordinasi manajemen ASN yang terintegrasi	